



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA



R E N C A N A K E R J A

T A H U N

2 0 1 7

PRAJA WIBAWA 1950

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 (Renja Satpol PP Prov Sumbar Tahun 2017) ini dapat disusun.

Penyusunan Renja ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan penjabaran rincian mengenai sasaran, tujuan, program dan kegiatan.

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017 disusun, atas dukungan semua pihak, kritik dan saran diucapkan terima kasih.

Padang, 2016

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sumatera Barat

H. Abdul Rahman,SE,MM
Pembina Tk I
NIP. 19600806 198603 1 007

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Provinsi Sumbar tahun 2015	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2015 & Renstra Satpol PP Prov Sumbar.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP Prov Sumbar	12
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	14
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	20
BAB III Tujuan, Sasaran Program Kegiatan.....	22
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	22
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP Prov Sumbar	23
3.3 Program dan Kegiatan	24
BAB IV PENUTUP	25
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah harus menyusun dokumen rencana pembangunan daerah yang sistematis, terarah, kontinyu dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Sehingga Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu, paralel dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), berdasarkan pasal 7 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, juga mewajibkan setiap satuan kerja perangkat daerah menyusun dan memiliki Rencana Kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD). Rencana Kerja merupakan rencana program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk satu tahun kedepan sesuai dengan pokok dan fungsi yang berfungsi sebagai pendukung kesuksesan penyelenggaraan pembangunan daerah dan suatu dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arahan pembangunan untuk mewujudkan sasaran – sasaran yang ingin dicapai selama satu tahun kedepan.



Sehubungan dengan amanat tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2016 ini menyusun Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017. Dalam penyusunan Rencana Kerja, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat memulai dengan tahap perencanaan penyusunan Renja diantaranya pembentukan tim penyusun Renja SKPD. Kemudian tahap selanjutnya pemrosesan penyusunan Renja diantaranya yaitu melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data atau informasi yang dilakukan dengan rapat – rapat serta koordinasi dari berbagai pihak terkait serta menganalisis gambaran pelayanan SKPD kemudian sampai pada tahap finalisasi Renja. Berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku bahwa pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat adalah untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Sumatera Barat.

Dalam hal keterkaitan antar dokumen perencanaan, Renja ini disusun dengan mempedomani Rencana Strategis (Renstra) dan mengacu pada RKPD. Bahwa berdasarkan tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan dalam Rencana Strategis dan RKPD tersebut, maka Renja merencanakan pencapaian dalam satu tahun. Hal ini untuk mensinkronkan program dan kegiatan dengan antar dokumen perencanaan sehingga menjaga konsistensi perencanaan pembangunan daerah. Kemudian Renja juga mempedomani Renja Kementerian/Lembaga dan Renja ini juga dapat sebagai acuan penyusunan Renja SKPD Kabupaten/kota yang terkait. Hal tersebut untuk mendukung suksesnya rencana pembangunan. Namun pada masa transisi saat ini maka Renja Satpol PP belum bisa mempedomani secara penuh terhadap dokumen RKPD, Renstra.

Berdasarkan Renja SKPD dan RKPD tersebut, maka dijadikan dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta ditindaklanjuti untuk proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang pada akhirnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang – Undang;
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat;



1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan yang sistematis dan dinamis dengan mengakomodasi berbagai hal berkaitan dengan strategik yang disusun untuk melaksanakan dokumen perencanaan SKPD periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember serta menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke dalam Renja SKPD dan RKA SKPD.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 adalah :

1. Sebagai pedoman rencana pembangunan tahunan untuk perumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2017.
2. Mendeskripsikan tentang program – program prioritas yang akan dilaksanakan Satpol PP.
3. Sebagai tolok ukur penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2017.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan



BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2015

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2015 dan Capaian Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2015

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2015 dan Capaian Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 juga harus dilakukan evaluasi.

Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2015

Dalam menjalankan program dan kegiatan tahun 2015, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat didukung dengan anggaran dari APBD Prov Sumbar Tahun 2015 yaitu Rp. 15.002.120.656,- untuk melaksanakan 8 program dan 53 kegiatan. Dengan rincian sebagai berikut: - Belanja tidak langsung Rp. 8.022.564.156,-

- Belanja langsung Rp. 6.979.556.500,-

Realisasi anggaran Satpol PP tahun 2015 yaitu: Rp.14.162.684.433,- atau 94,40% dan realisasi fisik 100%. Dengan rincian sebagai berikut :

1. Realisasi keuangan belanja tidak langsung yaitu: Rp. 7.565.226.988,- atau 94,30% dan realisasi fisiknya 100%
2. Realisasi keuangan belanja langsung yaitu: Rp. 6.597.457.445,- atau 94,53%. dan realisasi fisik sebesar 100%

Perkiraan Pencapaian tahun anggaran 2016

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni tahun anggaran 2016 dengan anggaran sebesar Rp.14.248.620.000,- dalam 9 program dan 53 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2015, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa realisasi program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 telah dijalankan dan terlaksana. Untuk rincian yang lebih lengkapnya terhadap capaian realisasi keuangan dan fisik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel T.VI.C.5.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015, perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2016 serta pencapaian target Rencana Strategis Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010-2015, maka secara umum berkinerja baik.



Tabel T.VI.C.5.

ALOKASI DAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK SATPOL PP TAHUN 2015

NO	BELANJA / PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
			Rp	%	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.022.564.156	7.565.226.988	94,30	100
1	Belanja Pegawai	8.022.564.156	7.565.226.988	94,30	100
	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.772.177.638	5.446.603.738	94,36	100
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.250.386.518	2.118.623.250	94,14	100
	BELANJA LANGSUNG	6.979.556.500	6.597.457.445	94,53	100
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.089.117.325	1.923.446.456	92,07	100
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.650.000	7.470.000	97,65	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	122.400.000	96.961.220	79,22	100
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	16.216.000	16.154.444	99,62	100
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	83.773.000	80.543.000	96,14	100
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	47.770.000	47.767.720	100,00	100
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.444.500	34.384.400	99,83	100
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	6.620.000	6.619.968	100,00	100
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	124.000.000	121.350.000	97,86	100
9	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang – Undangan	25.000.000	21.240.000	84,96	100
10	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	586.788.825	573.700.704	97,77	100
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	780.455.000	725.405.000	92,95	100
12	Penyediaan Jasa Asuransi Jiwa bagi Satuan Polisi Pamong Praja	108.000.000	108.000.000	100,00	100
13	Penyediaan Peralatan Pengamanan di Mesjid Raya	146.000.000	83.850.000	57,43	100
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	832.873.275	801.831.383	96,27	100
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	515.000.000	497.540.000	96,61	100



2	Pengadaan Meubeleur	30.000.000	30.000.000	100,00	100
3	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	41.351.500	41.351.500	100,00	100
4	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	27.500.000	27.500.000	100,00	100
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	4.700.000	4.700.000	100,00	100
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	79.500.000	70.568.108	88,76	100
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.800.000	6.800.000	100,00	100
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur	4.500.000	4.450.000	98,89	100
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	31.000.000	30.850.000	99,52	100
10	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	22.521.775	22.171.775	98,45	100
11	Pengadaan Alat-Alat Persenjataan Keamanan	70.000.000	65.900.000	94,14	100
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	188.612.400	182.925.600	96,98	100
1	Pengadaan Pakaian Dinas dan Berserta Kerengkapannya	188.612.400	182.925.600	96,98	100
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	66.179.980	51.463.800	77,76	100
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	66.179.980	51.463.800	77,76	100
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	148.171.300	139.271.300	93,99	100
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.189.000	7.189.000	100,00	100
2	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	6.660.100	6.660.100	100,00	100
3	Penatausahaan Keuangan SKPD	134.322.200	125.422.200	93,37	100
6	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Keamanan dan Ketertiban Umum	3.090.527.170	2.985.379.330	96,60	100
1	Pengamanan dan Pengawasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Pejabat VIP	105.049.500	104.706.400	99,67	100



2	Koordinasi Forum Komunikasi Lintas Provinsi dan Kabupaten / Kota se Sumatera Barat	139.103.600	132.030.125	94,91	100
3	Pengamanan Gedung Istana Bung Hatta dan Pengamanan Gedung VIP Bandara Internasional Minangkabau (BIM)	40.421.000	40.257.000	99,59	100
4	Koordinasi Pengawasan dan Pemantauan Depot Air Minum Lintas Kabupaten/Kota se Sumatera Barat	45.302.800	42.433.175	93,67	100
5	Koordinasi Patroli Lapangan dalam Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Kab/ Kota se Sumatera Barat	77.426.700	72.923.055	94,18	100
6	Pengawasan Cukai Ilegal di Provinsi Sumatera Barat	69.156.000	61.582.100	89,05	100
7	Penyediaan Jasa Tenaga Pengaman	1.459.873.500	1.444.772.250	98,97	100
8	Gelar Pasukan Satpol PP dan Satlinmas	191.230.500	187.656.550	98,13	100
9	Koordinasi dan Sosialisasi Upaya Penertiban Penyaluran Aspirasi Masyarakat	69.284.000	60.141.100	86,80	100
10	Inventarisasi Potensi Linmas di Kab / Kota	121.104.250	106.005.425	87,53	100
11	Deteksi Dini dan Penanganan Kerawanan Sosial dan Penyelenggaraan Tibum dan Tranmas oleh Satlinmas	128.655.000	119.216.050	92,66	100
12	Pelatihan Satgas Bencana Satuan Polisi Pamong Praja	122.198.450	118.045.250	96,60	100
13	Pelatihan Teknik Pengamanan dan Pengawasan serta Deteksi Dini Wilayah	158.029.800	142.008.800	89,86	100
14	Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pol PP di Kab/Kota Se Sumbar	112.521.620	106.191.325	94,37	100
15	Peningkatan Kapasitas Teknis Aparatur Satpol PP dan Linmas	30.661.550	28.761.550	93,80	100
16	Pelatihan Pengendalian Massa bagi Satpol PP Sumatera Barat	20.508.900	20.108.900	98,05	100
17	Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan PILKADA serentak	200.000.000	198.540.275	99,27	100
7	Program Peningkatan Supermasi Hukum dan Perlindungan HAM	300.448.550	273.637.088	91,08	100
1	Pegawasan Pelaksanaan Perda No 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	47.860.000	43.478.113	90,84	100
2	Penyuluhan Kode Etik PPNS dalam Melaksanakan Tugas Penyidikan	35.691.250	30.870.650	86,49	100



3	Pegawasan Pelaksanaan Perda No 8 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok	69.891.300	64.363.700	92,09	100
4	Peningkatan Koordinasi dan Kualitas PPNS Provinsi Sumatera Barat	61.934.000	56.683.975	91,52	100
5	Penyelesaian Administrasi Legalitas PPNS Sumatera Barat	85.072.000	78.240.650	91,97	100
8	Program Peningkatan Pemberantasan Maksiat	263.626.500	239.502.488	90,85	100
1	Pengawasan Penyidikan Pelanggaran Perda No 11 tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat	105.587.000	94.624.538	89,62	100
2	Operasi Gabungan Penegakan Peraturan Daerah	158.039.500	144.877.950	91,67	100
	JUMLAH	15.002.120.656	14.162.684.433	94,40	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

Pengukuran kinerja program dan kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program/kegiatan yang telah ditetapkan. Secara umum indikator kinerja meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran target indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.



2. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan diantaranya untuk program/kegiatan dan pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Berdasarkan program dan kegiatan dalam DPA Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat telah menjalankan penegakan Peraturan Daerah diantaranya Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat. Selanjutnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilaksanakan diantaranya patroli dan operasi gabungan dengan pihak terkait serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Sehingga pada dasarnya kinerja Satpol PP Prov. Sumbar hampir tercapai sesuai dengan tupoksi Satpol PP Prov Sumbar. Namun karena belum adanya SPM untuk tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi maka kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang ditentukan dalam SPM tidak dapat dilakukan, sehingga tabel T.VI.C1 nihil.



TABEL T.VI.C.1 : PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

PROVINSI SUMATERA BARAT

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK (PP 6/2008)	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	TAHUN 2013	TAHUN 2014	TAHUN 2015	TAHUN 2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		NIHIL										

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat telah menjalankan penegakan Peraturan Daerah diantaranya Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat. Selanjutnya penyelenggaraan

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dilaksanakan diantaranya patroli dan operasi gabungan dengan pihak terkait serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Namun, Provinsi Sumatera Barat merupakan wilayah yang cukup luas dimana terdiri dari 19 Kabupaten/Kota dan latar belakang penduduk yang beraneka ragam. Hal tersebut sangat dimungkinkan menimbulkan masalah/gangguan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum. Sehingga Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat semakin mempunyai tugas yang berat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat di Sumatera Barat. Hal tersebut untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi kepala daerah yaitu pengamalan filosofi masyarakat Sumatera Barat yaitu “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

Dalam hal koordinasi dan sinergitas dengan SKPD Kabupaten/Kota yaitu Satpol PP Kabupaten/Kota telah dilaksanakan diantaranya rapat forum komunikasi Satpol PP se Sumbar, operasi gabungan penegakan Peraturan Daerah. Kemudian sejalan dengan hal tersebut bahwa koordinasi dengan lembaga ditingkat pusat melalui peningkatan kapasitas aparatur dan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

.Adapun permasalahan dan hambatan yang berkembang dan kondisi yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Kondisi Saat Ini

Permasalahan yang terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Barat mengenai penegakan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sangatlah banyak dan kompleks. Adapun isu-isu yang berkembang dan sangat sering terjadi adalah sebagai berikut: Pemahaman reformasi sebagai suatu kebebasan yang seluas-luasnya untuk berbuat apa saja di kalangan



masyarakat yang menyebabkan terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; Merosotnya kepatuhan terhadap kaedah-kaedah atau norma-norma dan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai penata kehidupan masyarakat, seperti banyaknya terjadi perbuatan maksiat serta tindakan kriminal semakin variatif dan lintas wilayah; Pandangan apatis terhadap penegakan hukum sehingga adanya perlawanan terhadap aparat keamanan/penegak hukum maupun pemerintah yang dilakukan secara kolektif (kegiatan demonstrasi anarkis); Menguatnya fanatisme kedaerahan (lokalistik) dan masyarakat jarang memiliki kewaspadaan sosial yang mudah memicu konflik sehingga tidak terlaksananya perlindungan masyarakat; Perebutan SDA (Sumber Daya Alam) yang dipahami mendatangkan untung besar tanpa mempertimbangkan lingkungan dan regulasi.

2. Kondisi Yang Diinginkan

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat sebagai pembantu Kepala Daerah dibidang penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, menginginkan kondisi sebagai berikut: Meningkatnya penegakan peraturan daerah oleh satuan polisi pamong praja; Jaminan keamanan, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta kepastian situasi yang kondusif; Meningkatkan kewaspadaan dan kepedulian bersama sehingga terciptanya perlindungan masyarakat; Komunikasi sosial yang intensif dengan berbagai urusan di tengah-tengah masyarakat (ulama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat) diantaranya urusan pencegahan dan pemberantasan maksiat.

Berdasarkan informasi hal diatas, apabila dibiarkan dapat mengganggu pelaksanaan pembangunan daerah dan akhirnya pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sulit diwujudkan karena suatu daerah yang tidak tertib dan tidak tentram maka kondisi daerah

akan menjadi kacau berarti semua pihak di daerah tersebut tidak dapat bekerja/berusaha dengan tenang dan nyaman.

Walaupun begitu banyaknya permasalahan atau hambatan dalam pelaksanaan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat sebagai pembantu Kepala Daerah dibidang penegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, memiliki peluang untuk dapat meningkatkan kinerja diantaranya: koordinasi yang baik antar SKPD, koordinasi dan kerjasama yang baik dengan Satpol PP Kab/Kota, dukungan Korwas PPNS dalam melakukan penyidikan serta dukungan legislatif dan Pemerintah terhadap kebijakan, tindakan dan program Satpol PP. Kemudian tantangan dihadapi Satpol PP Prov Sumbar diantaranya: masih adaya stigma negatif terhadap Satpol PP, kurangnya keasadaran hukum dari masyarakat untuk mematuhi Perda, apabila Satlinmas bekerja maka akan ada resiko kecelakaan kerja, akan mengalami teror dari kejahatan serta merosotnya perilaku masyarakat untuk mematuhi norma agama dan adat.

Untuk formula isu-isu penting berupa rekomendasi dan cacatan yang strategis untuk perumusan program dan kegiatan nantinya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Penegakan Perda

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 bahwa salah satu tugas pokok Satpol PP yaitu menegakan Peraturan Daerah, yang berarti upaya Satpol PP untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran Perda. Hal ini terjadi karena beberapa Perda yang ada belum mempunyai sanksi hukum yang tegas sehingga tidak dapat memberikan efek jera terhadap pelanggar Perda. Kemudian dalam pelaksanaan

operasi lapangan penegakan Perda bahwa kemungkinan kebocoran informasi masih sangat besar karena ulah oknum-oknum tertentu. Dan seiring berjalannya waktu, jumlah Perda yang dikeluarkan daerah terus bertambah, hal ini berbanding terbalik dengan jumlah PPNS yang ada sehingga penegakan Perda dirasa belum optimal.

2. Masih kurangnya kesadaran berbagai pihak untuk menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

Perkembangan situasi dan kondisi sosial-politik masyarakat yang rentan bergejolak, baik akibat provokasi, tekanan struktur yang terlampau berat maupun akibat konflik kepentingan antar kelompok dan golongan yang seringkali melibatkan massa dalam jumlah yang cukup besar. Potensi Konflik Horizontal dan Konflik Kepentingan dapat terjadi mengingat seringkali belum diimbangi dengan tumbuhnya kedewasaan sikap warga masyarakat, maka bukan tidak mungkin akan rawan diwarnai munculnya berbagai gejala dan ancaman konflik horizontal yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

3. Menurunnya penyelenggaraan sistem perlindungan masyarakat

Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, pada saat ini partisipasi masyarakat menjadi anggota satlinmas masih kurang karena kesibukan masyarakat dan adanya anggapan bahwa anggota

satnmas adalah warga yang mengganggu. Kemudian dari segi pelaksanaan sistem perlindungan masyarakat juga masih kurang.

4. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Masih Kurang

Salah satu kunci sukses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi suatu organisasi adalah kompetensi aparatur yang berkualitas, hal tersebut juga dibutuhkan oleh Satpol PP. Namun pengembangan sumber daya aparatur masih kurang maksimal, hal ini terjadi karena jenis program/pendidikan pelatihan aparatur masih terbatas. Sehingga dapat dikatakan bahwa kompetensi sumber daya aparatur masih kurang. Sehubungan hal tersebut dan meningkatnya beban tugas dan tantangan aparatur maka diperlukan kompetensi aparatur yang memadai dan berkualitas.

5. Masih terjadinya perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat

Perbuatan maksiat merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan adat dan budaya masyarakat Sumatera Barat. Karena tata kehidupan masyarakat Sumatera Barat dipengaruhi adat dan budaya minang. Kemudian juga tidak sejalan dengan falsafah masyarakat Provinsi Sumatera Barat yaitu “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”, yang artinya Aturan adat berdasarkan aturan agama Islam, aturan agama Islam berdasarkan Al-Qur’an. Kemudian juga bertentangan dengan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat. Namun, walaupun telah menganut falsafah tersebut dan ditetapkannya Peraturan Daerah, perbuatan maksiat tersebut masih terjadinya di lingkungan masyarakat. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa perbuatan maksiat masih merupakan permasalahan utama dalam kehidupan masyarakat yang harus dicegah dan diberantas.

2.4 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Untuk menyukseskan pembangunan daerah Sumatera Barat, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat perlu didukung oleh berbagai pemangku kepentingan. Sehubungan hal tersebut, pemangku kepentingan dapat memberikan saran dan masukan terhadap rencana kerja ke beberapa usulan program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat. Usulan dari pemangku kepentingan bisa didapatkan melalui pengumpulan data dan informasi dari rapat – rapat seperti dengan Satpol PP Kabupaten/Kota se Sumbar. Kemudian melalui koordinasi dan konsolidasi program dengan kegiatan dengan pemangku kepentingan serta pengamatan dilapangan. Selanjutnya usulan tersebut harus ditelaah yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dan program prioritas pembangunan daerah. Pada rencana kerja tahun 2017, belum ada beberapa usulan kegiatan dari pemangku kepentingan diantaranya dari SKPD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat dan lembaga lainnya. Sehingga tabel T.VI.C.9 nihil.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Instansi pusat yang terkait dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat adalah Direktorat Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Berdasarkan rencana strategisnya terdapat rencana pembangunan yaitu program bina administrasi kewilayahan pada kegiatan pembinaan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan hal diatas dan menindaklanjutinya, Gubernur Sumatera Barat sebagai wakil Pemerintah Pusat didaerah harus melaksanakan urusan pemerintahan wajib dengan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu : ketenteraman, ketertiban umum dan serta perlindungan masyarakat dan dalam hal ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat.

Sehingga salah satu arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah nantinya adalah penegakan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Kemudian tantangan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat kedepan akan semakin berat diantaranya kemungkinan terjadinya konflik horizontal maupun konflik vertikal serta berbagai bentuk gangguan lainnya yang

mengancam kenyamanan masyarakat dan kekayaan daerah dan harus dapat ditangani secara koordinatif, komprehensif dan profesional.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Sehubungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 - 2021 masih dalam proses penyusunan maka tujuan dan sasaran yang digunakan adalah dokumen perencanaan perubahan sebelumnya dengan beberapa perbaikan dan didasarkan atas rumusan isu – isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan adalah gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat. Tujuan tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Terwujudnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat, aparat dan badan dalam melaksanakan Peraturan Daerah
2. Terwujudnya dan terselenggaranya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam kehidupan sehari – hari
3. Terwujudnya sistem perlindungan masyarakat dilingkungannya
4. Terwujudnya aparatur yang berkualitas dan kompeten
5. Terwujudnya kehidupan masyarakat madani yang aman, damai, tentram, harmonis (beriman dan bertakwa) dengan mengamalkan nilai universal keagamaan dalam kehidupan

Berdasarkan tujuan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat



2. Meningkatnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lintas kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat
3. Meningkatnya perlindungan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat
4. Meningkatnya kompetensi aparatur
5. Berkurangnya perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat

3.3 Program Dan Kegiatan

Rumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat yang direncanakan tahun 2017, didasarkan pada pertimbangan dari berbagai faktor – faktor, diantaranya tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, isu – isu strategis dan gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat serta pertimbangan lainnya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka program dan kegiatan dalam pagu yang diusulkan sebanyak 10 program dengan 54 kegiatan dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp.6.261.624.000,-. Sedangkan program dan kegiatan diluar pagu yang diusulkan sebanyak 11 kegiatan dengan kebutuhan dana/pagu indikatif sebesar Rp.4.286.470.000,- Lokasi program dan kegiatan tersebut umumnya diselenggarakan di berbagai kabupaten/kota se Sumbar. Untuk lebih terinci dapat dilihat pada tabel T.VI.C.10. (lampiran).



BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang harus disusun setiap SKPD termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat. Kemudian Renja akan menjadi bagian dari rancangan RKPD dan setelah ditetapkan juga akan menjadi bahan penyusunan KUA PPAS dan juga RAPBD.

Untuk menyukseskan pelaksanaan rencana program dan kegiatan tersebut, diharapkan mendapat dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah dan dukungan teknis dari berbagai stakeholders Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat. Dokumen Renja ini bersifat dinamis dan fleksibel dengan menyesuaikan keadaan terkini agar program dan kegiatan dapat menjawab tantangan prioritas.

Berdasarkan dokumen Renja ini, direncanakan sebagai salah satu sumber penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) kemudian dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat tahun 2017.







































**TABEL 3.3 : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2017
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2018
PROVINSI SUMATERA BARAT**

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SUMATERA BARAT

KODE	URAIAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018		Ket
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)	DANA LUAR PAGU	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
1	Urusan Wajib										
1.19	Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Serta Perlindungan Masyarakat				6,261,624,000	4,286,470,000				7,778,893,650	
1.19	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran			1,868,274,400	49,500,000				2,055,101,840	
1.19	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat (Jasa Pengiriman, Pengantar, Perangko Dan Materai)	Sumatera Barat	12 bulan	5,220,000		APBD		100%	5,742,000	
1.19	2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jasa Komunikasi (telepon), Listrik dan internet	Sumatera Barat	12 bulan	114,000,000		APBD		100%	125,400,000	
1.19	3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Premi Asuransi Kendaraan Dinas	Sumatera Barat	11 unit	29,407,000		APBD		100%	32,347,700	
1.19	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Terlaksananya Kebersihan Pada Lingkungan Kantor	Sumatera Barat	12 bulan	88,773,000		APBD		100%	97,650,300	
1.19	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terlaksananya Penyediaan Alat Tulis Kantor	Sumatera Barat	12 bulan	49,040,000		APBD		100%	53,944,000	
1.19	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Foto Kopi	Sumatera Barat	12 bulan	32,035,400		APBD		100%	35,238,940	
1.19	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Instalasi Listrik Untuk Penerangan Kantor	Sumatera Barat	12 bulan	4,970,000		APBD		100%	5,467,000	
1.19	8 Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor	Sumatera Barat	7 Unit	82,900,000		APBD		100%	91,190,000	
1.19	9 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan Dan Literatur Dalam Peningkatan Sumberdaya Aparatur	Sumatera Barat	12 bulan	25,000,000		APBD		100%	27,500,000	
1.19	10 Penyediaan Makanan dan Minuman	Terpenuhinya Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu	Padang	12 bulan	18,240,000		APBD		100%	20,064,000	
1.19	11 Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Dalam Dan Luar Daerah	Terpenuhinya Undangan Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Dalam Maupun Luar Daerah	Dalam dan Luar Sumatera Barat	12 bulan	593,489,000		APBD		100%	652,837,900	

KODE	URAIAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018		Ket	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)	DANA LUAR PAGU	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		
1.19	12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Tersedianya Jasa Pengaman, Makanan Dan Minuman Bagi Anggota Pol PP Yang Piket Di Lapangan	Sumatera Barat	12 bulan	712,200,000		APBD		100%	783,420,000	
1.19	13	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi, dan Publikasi	Terpublikasinya kegiatan Satpol PP	Sumatera Barat	12 bulan	5,000,000		APBD		100%	5,500,000	
1.19	14	Penyediaan Jasa Asuransi Jiwa Bagi Satpol PP	Terlaksananya Jaminan Asuransi Jiwa Bagi Satpol PP	Padang	120 orang	108,000,000		APBD		100%	118,800,000	
1.19	15	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Gedung Kantor	Sumatera Barat	31 Buah		49,500,000	APBD				
		Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya Sarana Dan Prasarana Aparatur			164,700,000	429,000,000				181,170,000	
1.19	1	Pengadaan Meubelieer	Tersedianya Pengadaan Meubelieer	Sumatera Barat	2 Set	30,000,000		APBD		100%	33,000,000	
1.19	2	Pengadaan Komputer Dan Jaringan Komputerisasi	Tersedianya Komputer, Laptop dan Printer	Sumatera Barat	6 Unit	19,800,000		APBD		100%	21,780,000	
1.19	3	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi	Terlaksananya Pengadaan Peralatan studio, Komunikasi dan informasi.	Sumatera Barat	5 Unit	8,500,000		APBD		100%	9,350,000	
1.19	4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi	Terlaksananya Pemeliharaan Alat Studio, Alat Komunikasi Dan Alat Informasi	Sumatera Barat	12 bulan	4,100,000		APBD		100%	4,510,000	
1.19	5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional	Sumatera Barat	12 bulan	45,000,000		APBD		100%	49,500,000	
1.19	6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Sumatera Barat	12 bulan	3,950,000		APBD		100%	4,345,000	
1.19	7	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelieer	Terlaksananya Pemeliharaan Meubelieer	Sumatera Barat	12 bulan	3,700,000		APBD		100%	4,070,000	
1.19	8	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Terlaksananya Pemeliharaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	Sumatera Barat	12 bulan	21,650,000		APBD		100%	23,815,000	
1.19	9	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Terawasi Aset Yang Terkelola Pada Kantor Satpol PP	Sumatera Barat	12 bulan	28,000,000		APBD		100%	30,800,000	
1.19	10	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas	Sumatera Barat	1 Unit		429,000,000	APBD				
1.19		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Peningkatan Disiplin Aparatur			163,400,000	70,000,000				179,740,000	
1.19	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas	Sumatera Barat	120 stel	163,400,000		APBD		100%	179,740,000	

KODE	URAIAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018		Ket
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)	DANA LUAR PAGU	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
1.19	2	Pengadaan Pakaian Hari - Hari Tertentu	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Hari - Hari Tertentu	Sumatera Barat	60 orang (Baju Putih, batik dan celana)		70,000,000	APBD			
1.19		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Aparatur			97,882,000				107,670,200	
1.19	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pol PP Yang Mengikuti Bimtek/Sosialisasi/Workshop/Seminar Dll	Indonesia	18 Orang	97,882,000		APBD		18 orang	107,670,200
1.19		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	Meningkatnya Tertib Administrasi Capaian Kinerja Dan Keuangan			347,381,200					382,119,320
1.19	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Satpol PP	Sumatera Barat	12 bulan	17,000,000		APBD		100%	18,700,000
1.19	2	Penyusunan Perencanaan Dan Penganggaran SKPD	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan dan Anggaran Satpol PP	Sumatera Barat	12 bulan	15,000,000		APBD		100%	16,500,000
1.19	3	Monitoring Dan Evaluasi Program Dan Kegiatan SKPD	Terlaksananya Monitoring Dan Evaluasi Program Dan Kegiatan Satpol PP Kab/Kota Se Sumbar	Sumatera Barat	19 Kab/Kota	165,381,200		APBD		100%	181,919,320
1.19	4	Penatausahaan Keuangan SKPD	Tersusunnya Laporan Bulanan Keuangan	Sumatera Barat	12 bulan	150,000,000		APBD		100%	165,000,000
1.19		Program Pencegahan Dan Pemberantasan Maksiat				244,810,900					269,291,990
1.19	1	Operasi Gabungan Penegakan Peraturan Daerah	Tegaknya Peraturan Daerah Dan Keputusan Kepala Daerah Serta Terpeliharanya Trantibum Di Sumatera Barat	Sumatera Barat	19 kali operasi di daerah Kab/Kota dan 1 kali ke luar provinsi	150,709,900		APBD		19 kali operasi di daerah Kab/Kota dan 1 kali ke luar provinsi	165,780,890
1.19	2	Pengawasan Pelaksanaan Perda No. 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Maksiat	Berkurangnya Perbuatan Maksiat	Sumatera Barat	19 kab/kota	94,101,000		APBD		19 kab/kota	103,511,100
1.19		Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			318,836,750					350,720,425

KODE	URAIAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018		Ket	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)	DANA LUAR PAGU	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		
1.19	1	Sosialisasi Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	Terwujudnya kesiapan Satlinmas dalam Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	Sumbar	1 kali Sosialisasi 30 orang Peserta dan 8 kali koordinasi	66,836,750		APBD		19 Kab/Kota	73,520,425	
1.19	2	Inventarisasi Potensi Personil Satlinmas di Kab / Kota	Terorganisirnya Satlinmas secara terstruktur	Sumbar	19 Kab/Kota	111,000,000		APBD		19 Kab/Kota	122,100,000	
1.19	3	Pembinaan dan Pemantauan Penyelenggaraan Linmas di Sumatera Barat	Terlaksananya Pembinaan dan Pemantauan, Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	Sumbar	15 Kab/Kota	109,000,000		APBD		19 Kab/Kota	119,900,000	
1.19	4	Pembentukan Regulasi Perlindungan Masyarakat	Terbentuknya sistem Perlindungan Masyarakat di Sumatera Barat	Padang	1 Regulasi	32,000,000		APBD		1 Regulasi	35,200,000	
1.19	5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Linmas di tingkat Kampung/lingkungan	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat	Sumbar				APBD				
1.19	6	Penyuluhan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat pada wilayah tertinggal, terpencil, rawan bencana, perbatasan dan wilayah kumuh perkotaan	Terciptanya Rasa Nyaman dan tenang bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari	Sumbar				APBD				
1.19	7	Pembangunan Pos Linmas pada wilayah tertinggal, terpencil, rawan bencana, perbatasan dan wilayah kumuh perkotaan	Terciptanya Rasa Nyaman dan tenang bagi masyarakat dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari	Sumbar				APBD				
1.19	8	Pengamanan dan pemantauan pelaksanaan pilkada oleh satlinmas	terciptanya kondisi pemilu aman dan tenang	Sumbar				APBD				
1.19		Program Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat				2,391,243,000	3,280,000,000				3,521,474,550	
1.19	1	Pengamanan Dan Pengawasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Dan Pejabat VIP	Terlaksananya Pengamanan Dan Pengawasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Dan Pejabat VIP	Sumatera Barat	82 kali	149,940,000		APBD		170 kali pengawalan dalam daerah	164,934,000	
1.19	2	Koordinasi Forum Komunikasi Lintas Provinsi dan Kabupaten / Kota Se Sumatera Barat	Tersusunnya Informasi Tentang Perkembangan Permasalahan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Dan Penyelenggaraan Penegakan Perda Serta Keputusan Kepala Daerah	Sumatera Barat	2 kali Rapat	127,843,000		APBD		2 kali Rapat	140,627,300	

KODE	URAIAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018		Ket
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)	DANA LUAR PAGU	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
1.19	3	Pengamanan Gedung Istana Bung Hatta Dan Pengamanan Gedung VIP Bandara Internasional Minangkabau (BIM)	Sumatera Barat	31 Pengamanan	75,077,000		APBD		8 orang sebanyak 35 kali	82,584,700	
1.19	4	Patroli Lapangan Dalam Pemeliharaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Lintas Kabupaten / Kota Se Sumatera Barat	Sumatera Barat	10 kab/kota dan 1 luar daerah	118,012,000		APBD		19 kali ke dalam daerah	129,813,200	
1.19	5	Gelar Pasukan Satpol PP Dan SatLinmas	Sumatera Barat	1 kali Upacara	208,375,000		APBD		1 kali Upacara	229,212,500	
1.19	6	Penyediaan Jasa Tenaga Pengaman	Sumatera Barat	51 Orang	1,643,730,000		APBD		51%	1,808,103,000	
1.19	7	Pengamanan Unjukrasa Dan Keramaian Dengan Aparat Terkait	Sumatera Barat	12 bulan	42,500,000		APBD		12 bulan	46,750,000	
1.19	8	Jambore Nasional Dan Gelar Pasukan Satpol PP Dan Satlinmas Tingkat Nasional		1 kali	25,766,000		APBD		1 kali	28,342,600	
1.19	9	Penyediaan Jasa Tenaga Pengaman	Sumatera Barat	85 orang		2,630,000,000	APBD				Persetujuan Bapak Gubernur tanggal 2/5/2016 (terlampir)
1.19	10	Operasi Gabungan Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Sumatera Barat			350,000,000	APBD				
1.19	11	Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat pada sektor destinasi pariwisata	Sumatera Barat			100,000,000	APBD				
1.19	12	Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Lintas daerah dan lintas Provinsi Tetangga (Sumut, Riau, Jambi Dan Bengkulu)	Sumatera Barat			100,000,000	APBD				
1.19	13	Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan PILKADA Serentak	Sumatera Barat			100,000,000	APBD				

KODE	URAIAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018		Ket
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)	DANA LUAR PAGU	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
1.19	14	Koordinasi Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Liar Di Sepanjang Daerah Aliran Sungai, Jalan Provinsi, Jalan Negara Dan Fasilitas Umum Lainnya Di Kab/Kota Se Sumatera Barat	Pengawasan Dan Penertiban Bangunan Liar Di Sepanjang Daerah Aliran Sungai, Jalan Provinsi, Jalan Negara Dan Fasilitas Umum Lainnya Di Kab/Kota Se Sumatera Barat	Sumatera Barat				APBD			
1.19		Program Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur				405,048,750				445,553,625	
1.19	1	Pelatihan Pengendalian Massa Bagi Anggota Satpol PP Sumatera Barat	Terlaksananya Ketangkasan Dan Keterampilan Anggota Pol PP Prov Sumbar Dalam Mengendalikan Aksi Massa	Padang	50 orang	54,770,800		APBD		50 orang	60,247,880
1.19	2	Latihan Beladiri Karate Bagi Anggota Satpol PP	Terlaksananya Latihan Beladiri Karate Bagi Anggota Satpol PP	Padang	75 orang	101,442,300		APBD		75 orang	111,586,530
1.19	3	Monitoring Dan Evaluasi Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pol PP Di Kabupaten/Kota Se- Sumatera Barat	Terlaksananya Monitoring Dan Evaluasi Sumber Daya Aparatur Pol PP Di Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat Dalam Rangka Pengembangan Kapasitas Personil	Sumatera Barat	44 kali dan 2 rapat	128,551,650		APBD		37 kali dan 5 jilid laporan	141,406,815
1.19	4	Pelatihan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	terlaksananya peningkatan kapasitas pol PP dalam Menangani gangguan tibum dan tranmas	Padang Panjang	30 orang	120,284,000		APBD		45 orang	132,312,400
1.19	5	Pelatihan Teknik Pengamanan Dan Pengawasan Serta Deteksi Dini Wilayah	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pol PP Dalam Memahami Teknik Pengamanan Dan Pengawasan Serta Deteksi Dini Wilayah	Padang				APBD			
1.19	6	Pelatihan Kesamaptaaan Bagi Anggota Satpol PP	Terlaksananya Peningkatan Fisik Dan Mental Anggota Satpol PP	Padang Panjang				APBD			
1.19		Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah Dan Pemberdayaan PPNS				260,047,000	408,470,000			286,051,700	
1.19	1	Pelaksanaan Penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Tegaknya Perda Nomor 3 Tahun 2012	Sumatera Barat	1 Perda	94,522,000		APBD		10 Perda	103,974,200
1.19	2	Peningkatan Koordinasi Dan Fasilitasi PPNS	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi PPNS	Sumatera Barat	8 kali	59,934,000		APBD		15 kali	65,927,400

KODE	URAIAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2017					CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2018		Ket
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)	DANA LUAR PAGU	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (RP)	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
1.19	3 Pemberkasan dan Persidangan Tipiring Penyelesaian Pelanggaran Perda	Terlaksananya Pemberkasan Dan Sidang Tipiring	Sumatera Barat	4 Kasus	40,341,000		APBD		80 orang	44,375,100	
1.19	4 Penyelesaian Administrasi Legalitas PPNS	Terkelolanya Dengan Baik Seluruh Administrasi PPNS	Sumatera Barat	18 Kab/Kota	65,250,000		APBD		1 Kab/Kota	71,775,000	
1.19	6 Pelaksanaan Penegakan Perda Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	Tegaknya Perda Nomor 3 Tahun 2012	Sumatera Barat			23,970,000	APBD				
1.19	7 Peningkatan Koordinasi Dan Fasilitasi PPNS	Terlaksananya Koordinasi Dan Fasilitasi PPNS	Sumatera Barat			384,500,000	APBD				

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sumatera Barat

H. Abdul Rahman, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19600806 198603 1 007